

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim, 2018, *Impeachment Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, 2019, *Penjabat Kepala Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung.

J. Kaloh, 2018, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ridwan HR., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta.

Topo Santoso, Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan
Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

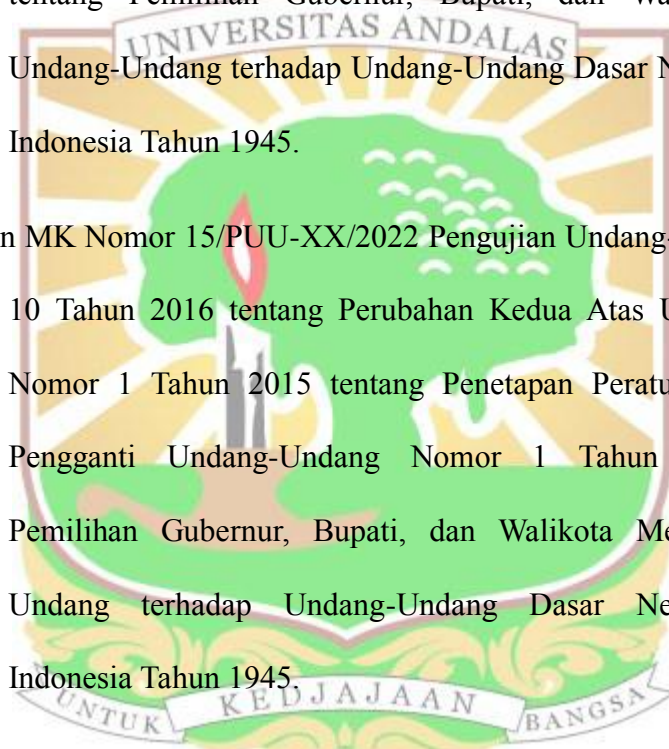


Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 37/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

C. Jurnal

Abustan, 2022, Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 2, No. 3.

Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, Ferry Nahdian Furqan, 2022, Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 2.

Alwi Reniwuryaan, Marthinus Johannes Saptanno, Vica Jillyan Edsti Saija, 2023, Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional Indonesia, *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 1.

Arief Rachman Hakim, dkk., Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1.

Aryo Wasisto, 2023, Transparansi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 2023, *Jurnal Info Singkat*, Vol. 15, No. 15.

Aulia Fitri, 2022, Polemik Penempatan TNI Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah, *Info Singkat*, Vol. 14, No. 11.

Fahri Bachmid, 2023, Keabsahan Pengisian Penjabat Kepala Daerah dari Tentara Nasional Indonesia, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Fajrian Noor Anugrah, 2023, Analisis Relevansi Penunjukan Anggota TNI/Polri Sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 18, No. 1.

Fathullah Syahrul, Muh. Abdi Goccing, 2020, Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 6, No. 2.

Furairhan Kamyil Arnazaye, Ariq Nabil Sulaiman, Muh Imam Kastholani, 2023, Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi, *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 17, No. 1.

Laode Harjudin, dkk., 2022, Menggugat Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat, *Journal Publicuho*, Vol. 5, No. 4

M. Addi Fauzani, Aprillia Wahyuningsih, 2021, Problematik Penjabat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, *Prosiding Call For Papers Hukum Kenegaraan: Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Moh. Khalilullah A. Razaq, 2020, Legalitas Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2.

Rahmazani, 2023, Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2.

Roman Situngkir, 2022, Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam Menjalankan Pemerintahan, *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Saiful Ahmad, Fahmy Adriawan Simin, Muh. Haikal Umakaapa, 2023, Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus

Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 9.

Syarifuddin Usmam, 2022, Polemik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, Jurnal Sains, Sosial, dan Humanoria (JSSH), Vol. 2, No. 1.

Zaqil Widad, 2023, Parameter Demokrasi dalam Penunjukan Pejabat Kepala Daerah, At-Tanwir Law Review, Vol. 3, No. 1.

D. Website

Bung Gunawan, Jabatan Fungsional dan Dwi Fungsi TNI, <https://kumparan.com/bung-gunawan/jabatan-fungsional-dan-dwi-fungsi-tni-1rOy1xz5ExE>

Erik Presetya, Perwira TNI Jadi Pejabat Kepala Daerah: 'Mencederai Reformasi dan Prinsip Demokrasi', Dwi Fungsi TNI/Polri Terulang Kembali?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61576564>

Erik Purnama Putra, Perludem Soroti Penunjukan Pejabat Gubernur yang Tertutup, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rbr3ag484/perludem-soroti-penunjukan-pejabat-gubernur-yang-tertutup>

Fatimatuz Zahra, MK Minta Jokowi Buat Aturan Pelaksana Penunjukan Pj Kepala Daerah, <https://tirto.id/mk-minta-jokowi-buat-aturan-pelaksana-penunjukan-pj-kepala-daerah-gtR1>

Bilal Ramadhan, Aturan Teknis Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Segera Dibuat, <https://news.republika.co.id/berita/rd1nt9330/aturan-teknis-pengangkatan-pejabat-kepala-daerah-segera-dibuat>

PSHK FH UII, Surat Edaran Mendagri 821/5292/SJ Harus Dicabut!,
<https://kumparan.com/pshkfhuii/surat-edaran-mendagri-821-5292-sj-harus-dicabut-1yuId3BkbfU/4>

Putra M. Akbar, Pengangkatan Pejabat yang Tidak Terbuka Dikritik,
<https://www.republika.id/posts/27893/pengangkatan-pejabat-yang-tidak-terbuka-dikritik>

Shania Mashabi, Pilkada Serentak 2024, Ini 101 Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan pada 2022,
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05300011/pilkada-serentak-2024-ini-101-kepala-daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada>

Website Tentara Nasional Indonesia, Sejarah TNI, <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>

Winda Nelfira, Mendagri Izinkan Plt, Pj, hingga Pjs Kepala Daerah Berhentikan dan Mutasi Pegawai,
<https://www.liputan6.com/news/read/5072317/mendagri-izinkan-plt-pj-hingga-pjs-kepala-daerah-berhentikan-dan-mutasi-pegawai>

